

## **ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BITUNG**

### *ANALYSIS OF REVENUE LEVY ON TERMINAL CITY DEPARTMENT OF TRANSPORTATION BITUNG*

**<sup>1</sup>Alfa Subiakto Pelealu,<sup>2</sup>Hendrik Manossoh**

*<sup>1,2</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado, 95117, Indonesia  
E-mail: [1alfa.pelealu@gmail.com](mailto:1alfa.pelealu@gmail.com)*

#### **ABSTRAK**

Pemerintah daerah haruslah kreatif, inovatif, dan efektif dalam mengolah setiap sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah harus berusaha keras untuk memaksimalkan setiap sumber penerimaan untuk dapat membiayai rumah tangga dan pembangunan daerah. Retribusi terminal merupakan sumber pendapatan daerah dan pencapaiannya haruslah diawasi. Tujuan penelitian ini mengetahui pertumbuhan, efektifitas, efisiensi penerimaan retribusi terminal Kota Bitung. Jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Hasil penelitian yaitu Pertumbuhan Penerimaan Retribusi sebesar 21,98%. Pada Tahun 2012 mengalami Pertumbuhan Penerimaan tertinggi dengan 93,8%, sedangkan pada tahun 2015 terjadi Pertumbuhan yang bersifat negative yaitu sebesar 62,04%. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 belumlah efektif dengan nilai rata-rata 89,2%. Dari tahun 2011-2015 bahwa nilai rata-rata efisiensi 35,08% dan dikatakan efisien.

Kata Kunci : Retribusi terminal, Pertumbuhan, Efektifitas, Efisiensi

#### **ABSTRACT**

*The local government must be creative, innovative, and effective in treating each source of revenue to increase revenue. The local government must strive to maximize every revenue source to be able to finance domestic and regional development. Terminal charges are a source of local revenue and achievements should be monitored. The purpose of this study to know the growth, effectiveness, efficiency retribution terminal Bitung City. This type of research is qualitative. The results of research that Levy Revenue Growth of 21.98%. In the Year 2012 is the highest Revenue Growth with 93.8%, while in 2015 the growth is negative in the amount of 62.04%. From the year 2011 to 2015 has not been effective with an average value of 89.2%. From the years 2011-2015 that the average efficiency of 35.08% and is said to be efficient.*

*Keywords: Retribution terminal, Growth, Effectiveness, Efficiency*

---

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 8, menyebutkan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dalam menggerakkan pemerintahan tentunya daerah otonom haruslah mempunyai anggaran rumah tangga dengan cara memaksimalkan setiap potensi yang ada di daerah otonom. Pemerintah daerah haruslah kreatif, inovatif, dan efektif dalam mengolah setiap sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pemerintah daerah harus berusaha keras untuk memaksimalkan setiap sumber penerimaan untuk dapat membiayai rumah tangga dan pembangunan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat besar dalam membiayai anggaran rumah tangga daerah, mengoptimalkan kedua sumber ini haruslah dilakukan dengan bijak oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah berbeda dengan Pajak Daerah, dimana Retribusi daerah dilakukan dengan berlandaskan Peraturan Daerah.

Retribusi daerah terbagi dari retribusi jasa usaha, jasa umum, dan perizinan tertentu yang akan sangat membantu dalam peningkatan pendapatan daerah, salah satu bidang yang harus dioptimalkan dan selalu ditinjau pengembangan fasilitas yaitu retribusi terminal yang termasuk dalam retribusi jasa usaha. Dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Pasal 131 ayat 1 dan 2 Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Diharapkan agar supaya objek retribusi ini dapat dimaksimalkan dengan baik oleh setiap daerah otonom.

Menganalisis tingkat penerimaan retribusi terminal di Kota Bitung merupakan cara untuk mengetahui seberapa besar kinerja dan juga upaya Pemerintah Kota Bitung dalam hal ini Dinas Perhubungan menggali sumber potensial untuk peningkatan pendapatan daerah.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat Pertumbuhan, Efektifitas dan Efisiensi dari penerimaan retribusi Terminal di Kota Bitung.

### Tinjauan Pustaka

#### Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 dimana pengertian otonomi daerah yaitu Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Monteiro (2016:3) memberikan arti otonomi sebagai *zelfwetgeving* atau perundangan sendiri, member arti mengatur atau memerintah sendiri.

#### Sumber Penerimaan Daerah

Haldenwang (2012), "*Government revenue is ; Tax, Social contribution, grants, and Other revenue*". Atau "Pendapatan pemerintah berupa pajak, kontribusi sosial, hibah, pendapatan lainnya."

Menurut Halim (2002;64) Penerimaan daerah ialah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

## **Pajak**

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011 : 1).

Menurut Arzayeva & Sadykhanova (2015) “ *Tax is a compulsory payments imposed by law, imposed on business and individuals in a certain size, in certain terms in the state budget*” atau Pajak merupakan sebuah wajib pembayaran dikenakan oleh hukum, dikenakan pada bisnis dan individu dalam ukuran tertentu, dalam hal tertentu dalam suatu Negara pada bagian anggaran.

## **Fungsi Pajak**

Mardiasmo (2011 : 1) menyebutkan bahwa “Ada dua fungsi pajak, yaitu Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur)”

### **a. Fungsi *budgetair***

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

### **b. Fungsi mengatur (*regulerend*)**

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

## **Tata Cara Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2011 : 6) Pemungutan Pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu :

### **a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)**

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

### **b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)**

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang – undang.

### **c. Stelsel campuran**

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

## **Asas Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2011 : 7) menjelaskan bahwa asas pemungutan pajak yaitu :

### **a. Asas domisili (asas tempat tinggal)**

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

### **b. Asas sumber**

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2011 : 7 ) Memaparkan ada 3 sistem pemungutan pajak, yaitu :

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### **Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan bagian sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil dan digunakan secara baik. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi (Tilaar R, 2013).

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011 : 12).

### **Retribusi**

Terdapat dua karakteristik yang penting dalam retribusi menurut Adolf Waqnerv C.Goedhart, (1973:94) dalam Eko Sumiyanto (2009) yaitu:

a. Adanya sifat kontraprestasi tertentu yang langsung dapat ditunjuk bagi jasa yang diberikan oleh negara.

b. Prestasi negara yang bersangkutan dilakukan berdasarkan tugas spesifik negara.

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo 2011:15).

### **Objek Retribusi Daerah**

Yang menjadi objek retribusi daerah adalah :

a. Retribusi Jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi jasa umum adalah : Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir

di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan limbah cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b. Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Jenis retribusi jasa usaha adalah : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan.

### **Subjek Retribusi Daerah**

Subjek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

b. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

### **Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan biaya disini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

b. Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

c. Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Yang dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin di sini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

### **Tata Cara Pemungutan Retribusi**

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (Dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

### **Pemanfaatan Retribusi**

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan (Mardiasmo 2011).

### **Kadaluwarsa Penagihan Retribusi**

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

### **Retribusi Terminal**

Dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Pasal 131 ayat 1 dan 2 Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi terminal adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2014, Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

### **Landasan Empirik**

Toduho Dessy (2014), Dalam skripsinya berjudul "Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah dan PAD. Metode analisis yang digunakan deskriptif kuantitatif, untuk menganalisis data target dan realisasi penerimaan retribusi pasar tahun 2009-2013 dengan menggunakan rasio efektifitas dan rasio kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mencapai tingkat efektifitas hanya pada tahun 2013 sedangkan tahun 2009-2012 belum efektif. Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah rata-rata 11,64% kemudian kontribusi retribusi pasar terhadap PAD rata-rata 5%. Walaupun kontribusi terhadap retribusi daerah dan PAD relatif kecil namun cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Persamaan dengan penelitian ini adalah Melakukan penelitian terhadap retribusi daerah. Perbedaannya yaitu Metode analisis yang berbeda.

Oruw Ester (2015), Dalam skripsinya berjudul Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kaimana, dimana penelitian ini bertujuan menganalisis Prosedur Pendaftaran, Pendataan dan Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Persampahan atau Kebersihan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, Prosedur Pendaftaran, Pendataan dan Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Persampahan atau Kebersihan yang diterapkan oleh Dinas Perizinan Umum Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat telah dilaksanakan sesuai dengan *Standard Operating Procedure*. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan Metode kualitatif. Perbedaannya yaitu hasil penelitian dilakukan dengan cara dinarasikan.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengamati suatu permasalahan yang ada sesuai dengan latar belakang, dan juga tujuan dari penelitian ini.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Bitung, Mulainya penelitian yaitu Maret – Mei 2016

### **Prosedur Penelitian**

Menyelesaikan proposal penelitian dan mengikuti seminar proposal, Melakukan permohonan izin penelitian di Dinas Perhubungan Kota Bitung, Melakukan wawancara dengan informan, Mengumpulkan data yang diberikan, Mengolah data, Membuat hasil dan pembahasan penelitian, Menarik kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan.

### **Jenis Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kuantitatif. Sedangkan, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan cara peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung di kantor Dinas Perhubungan Kota Bitung, dan data sekunder yang yang diperoleh berupa dokumentasi yang diberikan oleh pihak kantor Dinas Perhubungan Kota Bitung.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan; Wawancara, Dokumentasi.

### **Teknik Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Adapun rumus yang digunakan dalam penelitian ini untuk membantu menyelesaikan masalah, yaitu :

#### **a. Analisis Pertumbuhan**

Analisis pertumbuhan untuk mengukur seberapa besar presentase realisasi penerimaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$G = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Dimana :

$G_x$  = Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Terminal

$X_t$  = Realisasi Penerimaan Retribusi pada tahun tertentu

$X_{(t-1)}$  = Realisasi Penerimaan Retribusi pada tahun sebelumnya

#### **b. Analisis Efektifitas**

Efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Toduo, 2014). Analisis efektifitas ini digunakan untuk mengukur tingkat kinerja yang dilakukan dengan membandingkan hasil yang diterima dengan target yang ditetapkan. Dengan rumus, sebagai berikut :

$$E = \frac{R}{T} \frac{P_t}{P_t} \frac{t_i \text{ hu } t_i}{t_i \text{ hu } t_i} \frac{nt_i}{nt_i} \times 100\%$$

c. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi dilakukan dalam penelitian ini untuk membandingkan biaya yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan hasil yang telah didapatkan. Semakin kurang dari 100%, berarti tingkat efisiennya semakin baik.

$$E = \frac{B}{R} \frac{p_t}{p_t} \frac{r_t}{r_t} \times 100\%$$

**3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh data Target, Biaya, dan Realisasi Retribusi Terminal 2011-2015 Oleh Dinas Perhubungan Kota Bitung, sebagai berikut ;

**Tabel 1. Realisasi, Target, dan Biaya Retribusi Terminal Kota Bitung**

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Biaya Pemungutan (Rp)
2011	43.994.500	40.000.000	16.350.000
2012	85.261.500	85.000.000	29.735.000
2013	105.868.000	115.000.000	31.200.000
2014	139.751.000	165.000.000	38.105.000
2015	53.051.000	90.000.000	25.000.000

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 realisasi retribusi terminal yang di laksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bitung selalu mangalami peningkatan,walaupun dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 realisasi yang di capai oleh Dinas Perhubungan Kota Bitung tidak mencapai target yang ditetapkan.

**Pembahasan**

**Analisis Pertumbuhan**

Analisis Pertumbuhan berguna untuk mengetahui apakah penerimaan retribusi terminal oleh Dinas Perhubungan Kota Bitung dalam tahun tertentu atau selama beberapa tahun mengalami pertumbuhan secara positif ataupun negative. Dengan menggunakan rumus, sebagai berikut ( Halim, 2001 : 163 )

$$G = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Dimana :

- $G_x$  = Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Terminal
- $X_t$  = Realisasi Penerimaan Retribusi pada tahun tertentu
- $X_{(t-1)}$  = Realisasi Penerimaan Retribusi pada tahun sebelumnya

Dengan Perhitungan sebagai berikut:

$$2012 : \frac{8.2 .5 - 4.9 .5}{4.9 .5} \times 100\% = 93,8 \%$$

$$2013 : \frac{1 .8 .0 - 8.2 .5}{8.2 .5} \times 100 \% = 24,17 \%$$

$$2014 : \frac{1 .7 .0 - 1 .8 .0}{1 .8 .0} \times 100\% = 32\%$$

$$2015 : \frac{5 .0 .0 - 1 .7 .0}{1 .7 .0} \times 100\% = -62,04\%$$

**Tabel 2. Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal di Kota Bitung**

Tahun	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)
2011	43.994.500	-
2012	85.261.500	93,8
2013	105.868.000	24,17
2014	139.751.000	32
2015	53.051.000	(62,04)
RATA-RATA	85.585.200	21,98

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa dari tahun 2011-2015 mendapatkan rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Retribusi sebesar 21,98%. Pada Tahun 2012 mengalami Pertumbuhan Penerimaan tertinggi dengan 93,8%, sedangkan pada tahun 2015 terjadi Pertumbuhan yang bersifat negatif yaitu sebesar 62,04%. Realisasi Penerimaan pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan negatif dikarenakan adanya renovasi di wilayah TPR dan adanya juga penurunan target yang harus dicapai oleh Dinas Perhubungan Pada tahun 2015.

**Analisis Efektifitas**

Analisis ini digunakan untuk mengukur kemampuan Dinas Perhubungan dalam usaha merealisasikan target penerimaan retribusi terminal yang telah ditetapkan. Apabila hasil perhitungan efektifitas Retribusi Terminal mendekati 100% maka kinerja pemungutan Retribusi Terminal di Kota Bitung semakin baik. Untuk mengetahui rasio efektifitas digunakan rumus ;

$$E = \frac{R}{T} \frac{P_t}{P_t} \frac{t_1 \text{ hu } t_1}{t_1 \text{ hun } t_1} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus ini maka didapatkan hasil kemampuan Dinas Perhubungan dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan, sebagai berikut ;

$$2011 : \frac{4.9 .5}{4.0 .0} \times 100\% = 109,99 \%$$

$$2012 : \frac{8.2 .5}{8.0 .0} \times 100\% = 100,31\%$$

$$2013 : \frac{1.80}{1.00} \times 100\% = 92,06\%$$

$$2014 : \frac{1.70}{1.00} \times 100\% = 84,7\%$$

$$2015 : \frac{5.00}{9.00} \times 100\% = 58,94\%$$

**Tabel 3. Tingkat Efektifitas Penerimaan Retribusi Terminal di Kota Bitung**

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektifitas (%)
2011	43.994.500	40.000.000	109,99
2012	85.261.500	85.000.000	100,31
2013	105.868.000	115.000.000	92,06
2014	139.751.000	165.000.000	84,7
2015	53.051.000	90.000.000	58,94
RATA-RATA			89,2

Sumber: Data diolah

Dalam tabel di atas menunjukkan bahwa :

1. Pada tahun 2011 dan 2012 Dinas Perhubungan memiliki nilai efektifitas 109,99% dan 100,31% maka dari itu Dinas Perhubungan telah mencapai target penerimaan yang telah di tetapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kota Bitung sudah efektif karena memiliki pencapaian dalam melebihi target yang ditetapkan.
2. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Dinas Perhubungan tidak dapat mencapai target dengan masing-masing nilai 92,06%, 84,7%, 58,94%. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 tidaklah efektif. Hal ini dikarenakan ;
  - a. Mulai pada tahun 2013 Dinas Perhubungan telah bersepakat dengan pemilik kendaraan bahwa tidak akan lagi menambah angkutan penumpang dan setiap tahunnya terdapat angkutan yang sudah tidak layak dalam beroperasi.
  - b. Para Pemilik Kendaraan seringkali tidak masuk sampai dalam terminal sehingga tidak adanya pembayaran karcis.
  - c. Sudah banyaknya mobil pribadi dan masyarakat pada umumnya lebih memilih naik motor, sehingga aktifitas yang terjadi di terminal sudah sepi dan mengakibatkan mobil bus atau angkutan dalam kota lama dipenuhi penumpang dan lama berangkat.
  - d. Pada tahun 2015 Terminal Tangkoko sedang di renovasi aktifitas dalam terminal sedikit terganggu maka dari itu adanya penurunan target yang harus dicapai dari tahun sebelumnya.
3. Dapat dilihat di tabel bahwa mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tingkat pencapaian target yang ditetapkan tahun ke tahun mengalami penurunan, sehingga untuk keseluruhan mendapat rata-rata 89,2% dan dapat dikatakan belum efektif.

**Analisis Efisiensi**

Analisis Efisiensi digunakan untuk mengukur perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh penerimaan retribusi terminal sesuai dengan realisasi pencapaian. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut;

$$E = \frac{B}{R} \times \frac{p_t}{r_t} \times 100\%$$

Dikatakan Efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%, sehingga jika semakin kecil rasio tingkat efisiensi kinerja semakin baik. (Halim 2001 : 263- 264). Maka didapatlah hasil sebagai berikut ;

$$2011 : \frac{1.3 .0}{4.9 .5} \times 100\% = 37,16\%$$

$$2012 : \frac{2.7 .0}{8.2 .5} \times 100\% = 34,87\%$$

$$2013 : \frac{3.2 .0}{1.8 .0} \times 100\% = 29\%$$

$$2014 : \frac{3.1 .0}{1.7 .0} \times 100\% = 27,27\%$$

$$2015 : \frac{2.0 .0}{5.0 .0} \times 100\% = 47,12\%$$

**Tabel Tingkat Efisiensi Penerimaan Retribusi Terminal di Kota Bitung**

Tahun	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)
2011	16.350.000	43.994.500	37,16
2012	29.735.000	85.261.500	34,87
2013	31.200.000	105.868.000	29
2014	38.105.000	139.751.000	27,27
2015	25.000.000	53.051.000	47,12
RATA-RATA			35,08

Sumber: Data diolah

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa efisiensi kinerja Dinas Perhubungan berkisar pada 27,27% sampai dengan 47,12%. Pencapaian efisiensi kinerja terbaik ada pada tahun 2014 dengan 27,27% Dinas Perhubungan dapat memaksimalkan biaya yang ada untuk mencapai penerimaan retribusi terminal. Pada tahun 2015 menjadi Dinas Perhubungan mencapai efisiensi terburuk dengan 47,12%. Hal ini dikarenakan faktor pada tahun 2015 adanya renovasi yang dilakukan di terminal tangkoko, dan untuk biayanya sendiri sudah disediakan sebesar Rp. 25.000.000 dan tidak boleh melebihi biaya yang disediakan, karena biaya-biaya lainnya di fokuskan untuk renovasi terminal. Dapat dilihat dari tahun 2011-2015 bahwa nilai rata-rata efisiensi 35,08% dan dikatakan efisien.

#### 4. PENUTUP

##### Kesimpulan

1. Tingkat efektifitas penerimaan retribusi terminal belumlah efektif karena dari tahun 2011-2015 selalu mengalami penurunan dalam tingkat realisasi penerimaan retribusi terminal. Tahun 2011 merupakan yang paling efektif karena mempunyai nilai 109,99%, dan Tahun 2015 adalah tahun yang paling tidak efektif karena hanya memiliki nilai 58,94%
2. Untuk tingkat efisiensi penerimaan retribusi terminal sudah sangat efisien, Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Bitung bisa menekan biaya untuk pemungutan retribusi terminal sebaik mungkin, Dengan setiap tahunnya tidak melebihi 100%. Tahun yang paling efisien dalam penerimaan retribusi terminal ialah 2014 dengan 27,27% , tahun 2015 merupakan yang paling tinggi dengan nilai 47,12%.
3. Pada sisi pertumbuhan penerimaan retribusi terminal di Kota Bitung adalah Positif. Besarnya pertumbuhan ada pada tahun 2012 sebesar 93,8%, Pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang bernilai negatif dengan (62,04%), Dan rata-rata pertumbuhan penerimaan retribusi terminal di Kota Bitung bernilai (21,98%).

## Saran

1. Untuk tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi terminal di Kota Bitung mengalami peningkatan, Pemerintah Daerah harus melakukan pengawasan di lapangan dan menekan seluruh potensi yang ada agar pertumbuhan penerimaan retribusi terminal bernilai positif.
2. Untuk tingkat efektifitas penerimaan retribusi terminal di Kota Bitung, Baiknya Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan ; Memberikan sanksi kepada angkutan-angkutan yang tidak membayar retribusi, Lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap kolektor di lapangan, agar tidak terjadinya kelalaian dalam bertugas, Sosialisasi tentang pentingnya terminal bagi pendapatan daerah.
3. Untuk tingkat efisiensi penerimaan retribusi terminal di Kota Bitung, agar mengurangi atau menjauhi aktifitas yang bersifat pemborosan atau tidak bermanfaat dalam penerimaan retribusi terminal.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Paper dalam jurnal*

- [1] Arzayeva M., Mustafa A., Sadykhanova D., 2015. *Modern Tax System Of The Republic Of Kazakhstan*, Canadian center of science and education, Asian social science, Vol 11 No 21, ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025
- [2] Haldenwang C., ivanyina M., 2012. *A Comperative View on the Tax Performance of Developing Countries: Regional Patterns, Non-Tax Revenue and Governance*, Open- assesment E-Journal, Vol 6 2012-32
- [3] Tilaar R, 2013, Analisis Hubungan Pajak Reklame Terhadap PAD Dan Pajak Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan, Jurnal EMBA, Vol 1. No 3, ISSN 2303 1174
- [4] Toduhu D., Saerang D., & Elim I., 2014, Penerimaan retribusi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah kota tidore kepulauan, Jurnal EMBA, Vol 2 No 2, ISSN 2303-1174
- [5] Oruw E., & Afandi D., 2015, Evaluasi Sistem Penerimaan Retribusi Daerah Di Kabupaten Kaimana Papua Barat Tahun 2013-2014, Jurnal Emba, Vol 3 No 3, ISSN 2303-1174

### *Buku*

- [6] Halim, Abdul, 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.
- [7] Mardiasmo, 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011, ANDI, Yogyakarta.
- [8] Monteiro, Josef, 2016 Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah, Yustisia.

### *Skripsi*

- [9] Sumiyanto, Eko, 2009. Analisis Potensi Retribusi Terminal Penumpang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2001-2007, Yogyakarta.